



Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas IKIP PGRI Pontianak

Muhammad Anwar Rube'i*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Pontianak, Kalimantan Barat Indonesia

Email: rubeianwar139@gmail.com

Fusnika

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia

Article History

Submitted : 2025-06-11

Accepted : 2025-06-12

Revised : 2025-06-11

Published : 2025-06-13

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.9133>

Abstrak

Salah satu wujud nilai demokrasi di perguruan tinggi adalah terjadinya pergantian kekuasaan atau kepemimpinan baik rektor maupun dekan. Namun, realitas yang terjadi saat ini adalah masih terdapat distorsi antara sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Dekan dan Wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. alat pengumpul data penelitian adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemetasi pendidikan demokrasi dalam Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di IKIP PGRI Pontianak sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam menentukan pilihan, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan dan kesederajatan, kejujuran, saling menghargai dan menghormati.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi, Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas

Abstract

One of the manifestations of democratic values in higher education is the change of power or leadership, both rector and dean. However, the current reality is that there are still distortions between what is appropriate and not in accordance with democratic values and principles. This study aims to find out how the implementation of democracy in the election of deans and vice deans at IKIP PGRI Pontianak. This study aims to determine the factors that influence the implementation of democracy in the election of Deans and Deputy Deans at IKIP PGRI Pontianak. The research approach is qualitative. research data collection tools are interview guidelines, observation guidelines and documents. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of democratic education in the Election of Deans and Deputy Deans at IKIP PGRI Pontianak was in accordance with democratic principles and values, namely freedom of expression, freedom of choice, freedom of participation, equality and equality, honesty, mutual respect and honor.

Keywords: Democracy Education, Election of Deans and Deputy Deans Faculty.

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam sebuah pendidikan di perguruan tinggi sangatlah penting untuk era globalisasi saat ini. pendidikan demokrasi apabila dikelola dengan struktur yang memungkinkan dengan adanya praktik-praktik demokrasi dapat terlaksana, serta melibatkan masyarakat dalam membahas program-program, prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya



kepada publik. Salah satu tantangan pendidikan dewasa ini adalah membangun keterampilan abad 21 diantaranya adalah keterampilan melek teknologi informasi dan komunikasi (*information & communication technology literacy skill*), keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skill*), keterampilan memecahkan masalah (*problem solving skill*), keterampilan berkomunikasi efektif (*effective communication skill*) dan keterampilan berkolaborasi (*collaborate skill*) (Rohani & Anwar, 2019). Di sisi lain, pendidikan masih terjebak pada pandangan dan praktik yang tidak membangun ruang pembelajaran yang bisa memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keadaban. Dengan demikian, sistem dan praktik pendidikan di negeri ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gagal dalam membangun karakter bangsa (Hanun dan Setyowati, 2013).

Menurut Gandal dan Finn (dalam Winataputra 2012) terutama di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap “...*taken for granted or ignored* “, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, mereka tegaskan bahwa pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam dua seting besar, yakni “*school-based democracy education* “, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, dan “*society-based democracy education* “, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

Sementra itu, seperti dikemukakan oleh Winataputra (2012) bahwa belum berhasilnya pendidikan demokrasi di Indonesia secara mendasar karena belum dikembangkannya paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “*civic intelligence, civic participation and civic responsibility* “ melalui berbagai dimensi “*civic education* “ sebagai wahana utama pendidikan demokrasi tak bisa diwujudkan secara optimal. Indonesia diketahui sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini secara terencana, sistematis dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pembentukan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pendidikan demokrasi juga ikut andil membentuk karakter bangsa agar bersikap jujur, adil dan transparan (Syahban dan Sudarsono, 2018).

Dalam rangka mengoptimalkan perilaku dan sikap demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Mufti dan Naafisah (2013) menyatakan bahwa demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Dalam pemikiran Hobbes (dalam Mufti

dan Naafisah 2013) bahwa demokrasi memiliki sedikit arti penting. Berpikir bahwa self preservation merupakan tujuan utama manusia, dan bahwa masyarakat harus diatur untuk membatasi hasrat kekerasan manusia, Hobbes (dalam Mufti dan Nafisah 2013) menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan (*concentration of power*) diletakkan pada suatu tempat yang dinamakan kedaulatan (*soverighn*).

Dengan memahami urgensi demokrasi dan pilar-pilar demokrasi di atas, maka diharapkan mampu menterjemahkannya dalam bentuk wujud sikap dan perilaku yang demokratis pula, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam kultur kampus. dalam lingkungan kampus, demokratis biasanya diwujudkan dalam proses belajar dalam perkuliahan. Selain itu, wujud demokratis terjadinya pergantian kepemimpinan baik rektor, dekan dan wakil dekan, ketua program studi dan sekretaris program studi. Sampai saat ini, proses pergantian kepemimpinan atau kekuasaan yang ada di IKIP PGRI Pontianak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Anwar at al. (2020) bahwa “sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin baru di lingkungan kampus IKIP PGRI Pontianak sudah mengadopsi dan menginternalisasikan, dan mentransfomasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam wujud sikap dan perilaku yang demokratis berdasarkan Pancasila “.

Kalangan dosen dan mahasiswa juga ikut menyorot tata cara pemilihan dekan yang ingin menciptakan suasana dan nilai-nilai demokrasi yang terbuka, namun terbatas oleh aturan dan kebijakan hak pemilik suara sah yaitu senat institusi yang diwakilkan oleh ketua program studi, dekan dan wakil dekan, rektor dan wakil rektor serta seorang Guru besar. Dosen dan mahasiswa pun sepertinya juga enggan untuk memberikan usulan atau gerakan menuju proses demokrasi dalam pemilihan dekan. Mereka tampaknya hanya menerima dan mengikuti saja tata cara cara dan proses pemilihan dekan sampai dengan terpilihnya pimpinan yang baru.

Proses demokratisasi pergantian kepemimpinan di Lingkungan IKIP PGRI Pontianak masih terdapat hambatan yakni pemilik hak suara masih terbatas pada anggota senat yang merupakan perwakilan dari program studi dan fakultas. Masalah tersebut merupakan hambatan yang mengganggu dalam menciptakan demokratisasi dalam kehidupan kampus yang dimana semua dosen memiliki hak yang sama dalam memilih calon pemimpin yang amanah, bertanggungjawab, visioner, memiliki dedikasi dan berintegritas. Dalam implementasinya konsep dan nilai demokrasi tersebut, menurut Sukarno (2013) menyatakan tanpa adanya implementasi nilai-nilai demokrasi ini, suatu pemerintahan akan sulit ditegakkan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (*trust*), dan kerjasama. Pendidikan demokrasi ini menurut Azra (2002) secara substantif menyangkut sosialisasi, internalisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek

demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis dan beradab. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi pendidikan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan pendapat diatas Denzin dan Lincoln, dalam (Moleong, 2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. enelitian kualitatif merupakan metode analisis data secara induktif yang memungkinkan peneliti untuk mencitrakan pola-pola, kategori-kategori, dengan teknik mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak, mengembangkan konstruksi, dan interpretasi atas apa yang peneliti lihat, dengar dan pahami (Margret, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan peristiwa sesuai dengan kondisi yang ada. pendekatan kualitatif memiliki kesesuaian dan perangkat metodologis yang cocok dalam menganalisis berbagai fenomena di lapangan secara komperhensif

Setting penelitian dilaksanakan di Kampus IKIP PGRI Ponianak, berlokasi di Jalan Ampera Nomor 88, Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat. Subyek penelitian adalah dosen, ketua program studi dan dekan fakultas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, komunikasi langsung dan dokumentasi. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan observasi dan dokumen. Validitas data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi bukan semata-mata prinsip politik melainkan juga dasar ideologi yang kerap kali dijadikan alat perjuangan berbagai gerakan rakyat. Kemandirian politik rakyat menjadi tujuan utama bagi penerapan sistem demokrasi. Banyak ahli mencoba menjelaskan tentang demokrasi seperti, Hungtington yang dikutip oleh Suyatno dalam bukunya Menjelajahi Demokrasi. Menurut Hungtington (dalam Suyatno, 2008) bahwa “Demokrasi yang sesungguhnya adalah kebebasan, persamaan, persaudaraan, warga negara yang secara efektif

mengontrol kebijakan, pemerintah yang bertanggung jawab, jujur dan terbuka dalam politik memiliki pertimbangan yang rasional dan luas, kekuasaan partisipasi yang setara kebijakan-kebijakan lain dalam masyarakat “. Dalam kutipan tersebut sangat nampak jelas, jika berbicara demokrasi tidak sekedar membahas pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahunan atau dua kata yang membentuk kata demokrasi secara epistemologi. Akan tetapi lebih dari itu, bagaimana kebebasan individu yang ada, bagaimana persaudaraan yang tumbuh, apakah warga negara dapat mengontrol secara efektif, bagaimana dengan pertanggung jawaban pemerintah, apakah pemerintah tersebut benar-benar akuntabel, transparan serta bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan apakah telah melalui proses pertimbangan yang rasional yang berpihak kepada rakyat.

Secara umum bentuk-bentuk demokrasi dari sudut penyaluran kehendak rakyat dapat dibedakan antara lain: a) demokrasi langsung adalah rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya didalam rapat dihadiri oleh seluruh rakyat; b) demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada era modern ini, pada umumnya negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduknya cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dijalankan; c) demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu merupakan gabungan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan ini artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk sebagai dewan perwakilan mereka di parlemen tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem “referendum “ dan inisiatif rakyat (Gatara, 2009).

Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Dalam Pemilihan Dekan Dan Wakil Di IKIP PGRI Pontianak

Pendidikan demokrasi pada dasarnya upaya secara sadar dan terencana untuk mengembangkan, menanamkan, membina dan mensosialisasikan prinsip, ide dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Winataputra, 2012). Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Zamroni (2011) mengatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai

demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan dekan di IKIP PGRI Pontianak pada dasarnya berdasar pada prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang/ kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, dan transparansi. Terutama dalam pemilihan sebuah pimpinan institusi atau lembaga perguruan tinggi harus bebas, terbuka, adil, langsung, partisipasi aktif dosen, bebas dalam berpendapat dan siap untuk menang dan kalah. Menurut Fety Novianty (Sekretaris Prodi PPKn) mengatakan bahwa “Dalam pemilihan Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak, harus mampu menerapkan prinsip kebebasan untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, menghormati dan mengakui kekalahan dalam pemilihan, serta harus mampu bersikap terbuka dan jujur dalam sistem pemilihan ketua dan sekretaris program studi di kampus “.

Menurut Cholisin (2013) menyebutkan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut: a) kekuasaan berada pada pejabat terpilih; b) kekuasaan eksekutif dibatasi konstitusi dan bertanggung jawab (*acuntability*) kepada lembaga pemerintah yang lain; c) hasil pemilu tidak ditentukan sebelumnya, pihak oposisi harus memiliki peluang untuk menang, serta harus ada peluang pergantian partai yang memerintah; d) banyak saluran untuk menyatakan kepentingan dan nilai-nilai yang dianutnya, bebas menjadi anggota perkumpulan yang otonom; e) terdapat sumber-sumber informasi, seperti media, pers yang bebas; f) perorangan memiliki kebebasan yang substansial mengenai kepercayaan, pendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berkumpul, berdemonstrasi, dan menyatakan petisi; g) adanya persamaan hukum bagi semua warga Negara; h) *Rule of law* melindungi semua warga negara.

Sistem pelaksanaan pemilihan Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak sudah baik, hal ini dapat dilihat dari sistem pemilihannya sangat demokratis. Adapun nilai-nilai demokrasi yang dilaksanakan adalah adanya kebebasan untuk memilih dan dipilih, adanya calon yang diusulkan, adanya kebebasan menyampaikan visi, misi dan program dan sistem pemilihannya dipilih langsung oleh senat dosen perwakilan prodi di lingkungan prodinya masing –masing. Nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk penegakan pendidikan demokrasi di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk Indonesia dan beragamnya suku atau ras di Indonesia menjadikan nilai- nilai demokrasi sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya implementasi. Menurut Grindle (dalam Haedar, 2012:2) bahwa implementasi diartikan sebagai proses umum tindakan yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Nilai-nilai pendidikan demokrasi apabila dapat diimplementasikan, maka akan menjadi suatu proses dalam menciptakan suatu generasi yang memiliki sikap dan perilaku demokratis.

Sistem pemilihan dekan dan wakil di IKIP PGRI Pontianak pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, dan sudah memenuhi prinsip demokrasi. Hal sama apa yang di sampaikan oleh

Basuki Wibowo (Ketua Prodi Pendidikan Sejarah) bahwa pemilihan dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik di kampus, hal ini dapat dilihat dari perencanaannya berupa pembentukan panitia oleh kampus, melakukan sosialisasi calon pendaftar, menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pemilihan serta pada tahapan pemilihannya. Selain itu, mengungkapkan bahwa sistem pemilihan yang dilaksanakan dilakukans secara langsung, terbuka, jujur, adil, kebebasan berpendapat, partisipasi aktif dan kesetaraan.

Hal yang sama pula di sampaikan oleh Hendrik (Ketua Prodi Bimbingan Konseling) bahwa sistem pemilihan Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik selama ini. Prinsip demokrasi yang diwujudkan adalah prinsip keadilan, kebebasan, langsung, terbuka, jujur, dan transparansi. Menurut Hendrik mengatakan bahwa “Prinsip prinsip demokrasi sudah ada dalam pelaksanaannya. Prinsip yang dimaksud adalah pemiilihan secara langsung, dosen mempunyai hak yang sama dalam mencalonkan diri sebagai dekan dan wakil dekan. Artinya, ada prinsip keterbukaan dan prinsip keadilan dalam sistem pemilihan tersebut. Selain secara langsung, sistem pemilihan yang dilakukan secara jujur dan kesetaran, hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada intervensi darimanapun, tidak ada calon titipan dari pejabat manapun, dan semuanya transparan dan tidak ada kebohongan dan kecurangan di dalam pemilihan tersebut.

Dalam sistem pemilihan Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak yang berdasarkan pada sistem demokrasi, maka dalam pelaksanaannya harus berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi agar terbentuk budaya demokrasi yang baik dan sistem serta tatanan kerja yang baik pula. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Haryadi (Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia) bahwa prinsip demokrasi yang diwujudkan dalam dekan dan wakil di IKIP PGRI Pontianak diantaranya yaitu, jujur, adail, terbuka, transparan, kebebasan dalam memilih dan dipilih, serta menghargai dan menghormati orang lain.

Dari beberapa pernyataan di atas, bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pemlihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihar dari indikator nilai dan prinsip demokrasi yang dilaksanakannya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi secara langsung, kejujuran dalam pelaksanaannya, terbuka dan kesetaraan, kebebasan berpendapat dan memilih serta terpilih, adil dalam pelaksanaannya, serta saling menghargai dan menghormati dalam bersikap, berperilaku, dan siap menerima kekalahan serta mau mengakui kemenangan dari calon pasangan lainnya.

Menurut Rido (Ketua Prodi Pendidikan TIK) bahwa pemilihan Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak yang sudah di laksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi unsur –unsur prinsip demokrasi di dalamnya. prinsip demokrasi yang dilaksanakan

adalah prinsip pemilihan demokrasi langsung, dimana dalam hal ini Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak dipilih langsung oleh dosen sebagai senat kampus. Prinsip kedua yaitu prinsip kebebasan, dimana dalam hal ini setiap dosen memiliki hak yang sama dalam memilih dan mencalonkan diri sebagai Dekan dan Wakil di IKIP PGRI Pontianak sesuai dengan persyaratan calon yang dibuat oleh panitia pelaksanan. Selanjutnya prinsip kejujuran dan keterbukaan, dimana dalam hal ini tidak ada kebohongan, kecurangan, ataupun calon titipan dari pihak manapun dalam pemilihan tersebut, semua dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Rohani (Wakil Dekan Fakultas IPPS) bahwa pelaksanaan demokrasi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari prinsip demokrasi yaitu: a. jujur dan adil, secara umum pelaksanaan pemilihan dekan dan wakil dekan berjalan dengan jujur dan adil karena dilakukan dengan pemungutan suara melalui anggota senat dan dilaksanakan layaknya pemilihan umum, b. transparan secara umum pemilihan sudah transparan, kita sudah membuat pengumuman mulai dari visi misi calon rektor dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut; c. menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan, dilihat dari jadwal dan mekanisme yang sudah di atur lewat senat selain itu kriteria pemimpin juga sudah diatur berdasarkan Statuta IKIP PGRI Pontianak.

Berkaitan dengan temuan penelitian di atas, bahwa nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, *et al* (2002) dalam Tukiran Taniredja (2009) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antarwarga, rasa percaya (*Trust*) dan kerjasama. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Pelaksanaan demokrasi dalam Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakannya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi secara langsung, kejujuran dalam pelaksanaannya, terbuka dan kesetaraan, kebebasan berpendapat dan memilih serta terpilih, adil dalam pelaksanaannya, serta saling menghargai dan menghormati dalam bersikap, berperilaku, dan siap menerima kekalahan serta mau mengakui kemenangan dari calon pasangan lainnya.

Dalam pendidikan demokrasi memerlukan usaha yang nyata dari setiap warga negara untuk mendukung peningkatan pendidikan demokrasi. Hal tersebut yakni dengan adanya nilai-nilai demokratis yang menjadi perilaku warga negara yang bersandar atau bersifat demokratis. Menurut Hendry B. Mayo (dalam Winarno, 2019) nilai-nilai demokrasi meliputi; menghormati kebebasan, menghargai perbedaan, damai dan sukarela, teratur, adil, memahami keanekaragaman, menghormati kebebasan, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. Menurut Zamroni (2011), apabila manusia tidak memegang nilai-nilai Pancasila dengan teguh, maka terciptanya masyarakat yang demokratis akan menjadi impian belaka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan pendidikan nilai demokrasi dalam

pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti kaidah dan prinsip demokrasi. Adapun prinsip demokrasi dalam pemilihan ketua dan sekretaris prodi sebagai berikut :

1. Pemilihan secara langsung dan demokratis

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. dalam hal ini dosen diberikan wewenang luas untuk memilih secara langsung siapa calon ketua dan sekretaris yang mereka kehendaki. Mariana (2008) bahwa pemilihan umum merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk mewujudkan demokrasi. pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “LUBER “ yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia “. “Langsung “ berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. “Umum “ berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. “Bebas “ berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. “Rahasia “ berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

2. Kebebasan Menyatakan pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian setiap manusia dituntut untuk belajar menghargai setiap perbedaan dalam berpendapat dan mampu mengembangkan sikap hidup yang mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat.

Mengemukakan pendapat juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks yang ada dalam artian hubungan antara orang yang menyampaikan gagasan dengan orang yang diajak berkomunikasi serta permasalahan yang sedang dibahas. Dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penyampain pendapat dimuka

umum memiliki arti bahwa pendapat tersebut didengar, dilihat, dan dirasakan oleh massa sehingga dalam penyampaian pendapat dimuka umum harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

3. Kebebasan dalam menentukan pilihan

Kebebasan dalam menentukan pilihan berkaitan erat dengan perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). “David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih “ (dalam Hasanuddin, 2007). Dalam penerapan prinsip demokrasi pada pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di IKIP PGRI Pontianak sangat penting diberikan kebebasan dosen dalam menentukan pilihan calon yang dianggap kompeten dan membawa perubahan.

4. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan terwujudnya kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil. sistem demokrasi di kampus harus melaksanakan prinsip keadilan yang merata bagi dosen dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak. Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: a) kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; b) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; c) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; d) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; e) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; f) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; g) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

5. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hantington dalam Arifin (2006) memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap

sproradis, secara damai atau dengan kekerasan ,legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif. Surbakti (1999) ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu (Suharyanto, 2014). Terbukanya partisipasi politik merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik (Arief, 2010). Dengan semakin terbukanya sikap politik masyarakat maka akan menghasilkan pemimpin yang demokratis yang akan menjamin kesamaan hak dan kewajiban masyarakatnya. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik akan berdampak pada kesamaan hak dan kesempatan dalam pelaksanaan pemilihan langsung (Arwiyah, 2012).

6. Prinsip menghormati dan menghargai

Pelaksanaan demokrasi dalam Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di IKIP PGRI Pontianak harus memegang prinsip saling menghormati dan menghargai. Setiap orang harus bisa menghargai pendapat yang berbeda, menghargai dan menghormati dalam menentukan calon pemimpin, serta harus bisa menghargai dan menghormati pasangan calon yang menang dalam pemilihan. Nurul Zuriah (2007) mengungkapkan bahwa saling menghargai/menghormati adalah sikap dan perilaku untuk menghargai dalam hubungan antar individu dan kelompok berdasarkan norma dan tata cara yang berlaku. Setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai satu sama lain tanpa melihat dari latar belakang sosialnya. Rasa saling menghargai tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti menyapa, senyum, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan haknya, dan lain sebagainya.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Dalam Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Di IKIP PGRI Pontianak

Pelaksanaan pendidikan demokrasi sebetulnya menyangkut dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam kedudukannya sebagai warga ataupun sebagai pejabat yang diberi kewenangan. Perilaku adalah manifestasi dari kebudayaan sebab kebudayaan terwujud dan disalurkan melalui perilaku manusia. Anis Ibrahim (2012) mengemukakan prinsip dasar demokrasi itu paling tidak ada lima prinsip yang meliputi meliputi: (a) prinsip keterbukaan,(b) prinsip partisipasi publik, (c) prinsip persamaan/kesetaraan, (d) prinsip kebebasan, (e) prinsip kontrol rakyat terhadap proses kebijakan yang dibuat elite.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku demokrasi beraneka ragam, diantaranya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kepercayaan kepada pemerintah. Selain dari itu faktor-faktor lainnya adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Surbakti, 1992). Disamping itu pengetahuan tentang demokrasi juga mempengaruhi perilaku demokrasi. Bila kita ingin mewujudkan masyarakat

yang demokratis tingkatkanlah pendidikan dan pengetahuan serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti yang diungkapkan di atas. Suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi adalah taat akan nilai dan aturan-aturan hukum yang telah disepakati, karena nilai dan aturan hukum itulah yang membingkai demokrasi.

Faktor yang mempengaruhi penerapan pendidikan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak yaitu, faktor kesadaran politik, sarana dan prasarana, kepemimpinan, dukungan lembaga serta faktor kondisi dan suasana kampus. Menurut Ahwa terdapat faktor yang mempengaruhi penerapan pendidikan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak yaitu, faktor kesadaran diri seseorang terhadap keterlibatan aktif dalam memilih dan menentukan calon pemimpin. Faktor kepemimpinan institusi kampus juga mempengaruhi sistem dan budaya demokrasi. Faktor lainnya yaitu dukungan moral dari lembaga kampus, serta faktor berikutnya adalah sarana dan prasarana yang baik akan mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sistem demokrasi.

Novianty dan Sulha (2019) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak dapat dikondisikan dengan baik dapat dilihat dari: a) pelaksanaan pemilihan rektor dilakukan dengan asas keterbukaan karena semuanya kita sampaikan lewat rapat maupun dalam pemilihan dan diikuti oleh anggota senat, b) ada mekanisme pemilihan jadi tidak semua dosen ikut dalam pemilihan. c) semua pemilih memiliki persamaan dan kesetaraan tidak ada yang kita beda-bedakan dalam pemilihan rektor. d) Kebebasan menjadi landasan dalam pemilihan rektor dengan mengikuti Statuta IKIP PGRI Pontianak, contohnya saja kebebasan dalam menentukan calon rektor yang mereka pilih. e) Prinsip kontrol terus dilakukan pada tugas dan kinerja rektor terpilih supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi di lembaga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan pendidikan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak diantaranya pertama, kesadaran politik, dalam hal ini berhubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Ada dua bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan momen pemilu seperti saat ini, yaitu ikut serta dalam kampanye pemilu dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Menurut Surbakti (2007) bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran

politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut. Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Faktor kedua, kebijakan kepemimpinan dimana dalam ini kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kepemimpinan sebagai suatu proses dapat berlangsung di dalam dan di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis, karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu, yang bersifat dinamis pula. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang bervariasi, karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu kepemimpinan akan berlangsung efektif, apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan type kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpin, untuk ikut berperan serta dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan.

Faktor ketiga yaitu kesetaraan merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlakukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi-etnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Prinsip kesetaraan memberi ruang bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, agama, ras untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan diperlukan sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat.

Sedangkan faktor keempat, yaitu faktor situasi dan kondisi politik. situasi politik dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. suasana dan kondisi politik kampus sangat berpengaruh terhadap pemilihan kepemimpinan. suasana dan kondisi budaya, sosial dan emosional kondusif maka sistem demokrasi yang diterapkan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika suasana dan iklim kampus kurang kondusif, maka pelaksanaan sistem demokrasi akan terganggu dan mungkin akan terhambat. Oleh karena itu, kondisi emosional yang baik, kondisi sosial dan ekonomi baik, maka pelaksanaan demokrasi akan

berjalan dengan baik pula.

Faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku masyarakat. Perilaku politik suatu masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur kekuasaan. Seorang pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi, bahkan menciptakan dan menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga para pengikut dapat mempengaruhi pemimpin yang diinginkan. Sebaliknya seorang pengikut dapat mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan, dan menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya (Hidayat, 2002).

SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pemilihan dekan dan wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, yaitu (a) Kebebasan dalam menyatakan pendapat, yaitu setiap calon diberikan ruang dan waktu serta kebebasan untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan diri dan menyampaikan visi, misi dan program kerja. (b) kebebasan dalam menentukan pilihan, yaitu bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat, mendukung dan bekerjasama. (c) kebebasan berpartisipasi, yaitu adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dalam sistem pencalonan, serta ikut aktif berpartisipasi dalam pemilihan. (d) kesetaraan dan kesederajatan, yaitu adanya kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam mencalonkan diri berdasarkan persyaratan yang ditentukan panitia penyelenggara. (e) kejujuran, yaitu sistem pemilihan dilaksanakan secara jujur tanpa ada kecurangan dan kebohongan. (f) saling menghargai dan menghormati, yaitu perbedaan pendapat, visi, misi dan program kerja serta kalah dalam pemilihan tetap dijunjung tinggi dan saling menghormati.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam pemilihan Dekan dan Wakil dekan di IKIP PGRI Pontianak yaitu (a) keterbukaan publik, dimana informasi pemilihan dekan dan wakil dekan disosialisasikan melalui media dan media sosial. Selain itu, dari proses pencalonan, pemberkasan, seleksi calon kandidat, penyampaian visi dan misi, pemilihan, penetapan dan pelantikan dilakukan secara terbuka dan sangat transparan. (b) Kebijakan dan peraturan yang jelas dalam mekanisme pergantian dan pemilihan kepemimpinan, yaitu pemilihan dekan dan wakil dekan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali sesuai dengan Statuta IKIP PGRI Pontianak. (c) Kesederajatan dan kesetaraan, dimana semua dosen memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepemimpinan; (d) Budaya akademik yang humanis dan kondusif, yaitu dalam sistem pemilihan tetap menjaga etika, sopan santun, norma agama, dan hubungan yang baik antara pasangan calon pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar & Rohani. (2020). Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi Berdasarkan Sila Ke-Empat Pancasila dalam Pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 4 (1), Juni 2020, 59-69.
- Arief, U. (2010). Mencipakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 3 (2), 139–147.
- Arwiyah, M.Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR. Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Vol. 28 (1), 85–92
- Arifin, Anwar. (2006). *Pencitraan dalam Politik : Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekonsiliasi dan Demokratisasi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak
- Gatara, Sahid. (2009). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia
- Hanun dan Setyowati. (2013). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Pada Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 1 (3) Tahun 2013
- Ibrahim, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Prinsip Dasar Demokrasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Hukum Argumentum*. 20 November 2012
- Margret, Anna. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Depok: Puskapol FISIP UI.
- Mufti dan Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moleong. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Novianty dan Sulha. (2019). Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasidalam Pemilihan Rektor IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, (1), Juni 2019,43-54.
- Rohani dan Anwar. (2019). Keterampilan Intelektual Melalui Penerapan Model Project Citizen Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *VOX EDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol.10(2), Nopember 2019, 93 – 104.
- Syahban dan Sudarsono. (2018). Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Mata Pelajaran IPS Di SMA Negeri 6 Takalar. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan Sosioologi*. Vol. VI. (1). Juli-Desember 2018
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. Vol. 2 (2), 151–160
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sukarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyahmo. (2015). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Taniredja, Tukiran. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Purwokerto: CV. Alfabeta.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan* (http://repository.ut.ac.id/6032/1/2013_142.pdf di akses pada tanggal 28 Juli 2017).
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta:Gavin Kalam Utama.